

Peran Media Massa Dalam Status Darurat Militer (Studi Kasus di Aceh dari pandangan seorang wartawan)

Oleh: Atmadji Sumarkidjo *)

Pendahuluan

Untuk pertama kalinya dalam sejarah operasi militer di Indonesia, sisi pembukaan operasi militer dari operasi terpadu pemulihan Aceh disiarkan serentak oleh media massa nasional, di beberapa televisi malah disiarkan secara *live*, dari wilayah konflik di Nangroe Aceh Darussalam (NAD). Kalau kita tidak mendengar narasinya atau tidak mengenali wajah dan seragam TNI nya, mungkin kita semua menyangka bahwa ini adalah Operasi Amerika Serikat di Irak tahap ke sekian.

Sebagian dari para wartawan yang meliput penyerbuan pasukan-pasukan TNI ke lokasi-lokasi dimana dianggap dikuasai oleh Gerakan Aceh Merdeka (GAM) adalah para wartawan yang beberapa minggu sebelumnya telah mengikuti penataran kemiliteran di pusat latihan militer milik Kostrad di Gunung Sanggabuana, Jawa Barat. Para wartawan media Jakarta itu, kemudian di *embeded* kepada sejumlah pasukan TNI yang melakukan operasi di berbagai wilayah di NAD.

Sejumlah suara pro dan kontra juga muncul setelah penataran itu. Yang kontra mencurigai bahwa penataran itu adalah untuk men brainwash para wartawan sehingga akan melaporkan hal-hal yang baik mengenai pasukan TNI yang akan mereka ikuti, sementara pihak yang mencoba melihat soal itu secara jernih yakin bahwa pemberian perbekalan tersebut justru akan memberi pengertian yang lebih baik dan mendalam mengenai segi-segi lain dari suatu operasi militer. Pihak yang berpikiran positif melihat bahwa dengan pengetahuan yang diberikan, para wartawan mendapat “ilmu” tambahan untuk menyelamatkan diri bila terjadi konflik bersenjata yang nyata di hadapan mereka.

Dalam suasana yang harus diakui terpengaruh oleh cara-cara liputan pers Amerika dalam Perang Teluk yang baru lalu, yang amat berbeda dengan kesempatan liputan Perang Teluk tahun 1991, pers melakukan cara-cara peliputan langsung dari para reporternya yang berada di lapangan baik melalui televisi maupun beberapa jam kemudian di media cetak. Adalah kebetulan teknologi pengiriman berita dari jarak jauh telah dipunyai pula oleh pers Indonesia sehingga liputan *live* televisi maupun pengiriman foto melalui satelit (bagi media cetak) seperti yang dilakukan para wartawan Amerika atau Barat yang lain, mampu pula dilakukan oleh insan pers Indonesia dari segi kecepatan maupun kelengkapannya

Karena sisi operasi pemulihan keamanan di NAD menjadi sorotan berbagai pihak yang tidak menginginkan terjadinya lagi peristiwa Daerah Operasi Militer (DOM), maka setiap langkah dari operasi tersebut harus bisa ditempatkan dan dijaga agar tetap berada dalam koridor hukum dan demokrasi. Disinilah harus diakui bahwa unsur pengawasan yang paling efektif adalah media massa. Dengan kemajuan teknologi masa sekarang, setiap penyimpangan prosedur atau pelanggaran HAM mampu dilaporkannya dalam waktu cepat kepada khalayak. Dan Pers yang mampu melakukan hal itu adalah pers yang independen dan mampu terus mengedepankan prinsip tidak berpihak secara konsisten.

*) Disampaikan pada Focus-Group Discussion SSR ProPatria pada tanggal 10 Juni 2003 bertempat di Hotel Mulia, Jakarta.

Bedah Kasus:

1. Kasus 21 Mei 2003 di Desa Cot Rabo Tunong, Mata Maplam dan Alue Geulumpang Menunjukkan betapa laporan, baik oleh wartawan *BBC* maupun oleh kantor berita *AFP* mengemukakan fakta atau data berbeda, demikian pula tim investigasi POM TNI & Tim wartawan lima media. Ada beberapa hal yang menarik yang kita bisa ambil sebagai kesimpulan dari peristiwa itu:

- Saksi yang katanya mengetahui peristiwa orangnya berbeda-beda, dan tidak cukup kuat untuk mengatakan bahwa mereka yang menyaksikan penembakan itu.
- Kejadian yang sebenarnya masih simpang-siur sampai para anggota yang dikatakan bersalah dibawa ke Mahkamah Militer.
- Sempat ada bantahan yang bersifat reaktif, sebelum sebuah tim gabungan POM dan wartawan di kirim ke lokasi. Wartawan media nasional keburu di cap “tidak patriotik” karena mengutip laporan kantor berita asing, sebelum melakukan konfirmasi terlebih dahulu

Meskipun demikian, kasus penganiayaan oleh sejumlah anggota TNI terhadap penduduk sipil yang tidak bersalah merupakan sebuah test case yang menarik dikaji karena pada akhirnya sejumlah anggota TNI dibawa ke pengadilan (militer). Dari segi *public relations*, ini adalah sebuah kampanye yang bagus sekaligus menunjukkan konsistensi ucapan Panglima TNI dengan perbuatan.

2. Kasus 4 Juni 2003 di desa Lueng Gayo, Kecamatan Aceh Jaya. Seorang turis Jerman Lothar Heinrich Albert (54) tertembak mati oleh petugas TNI, sementara isterinya Elisabeth Engel (50) mengalami luka tembak. Keduanya ditembak ketika tidak memberi jawaban yang memuaskan ketika patroli TNI memergokinya, karena kondisi adalah malam hari, akhirnya mereka ditembak. Beberapa fakta yang bisa diambil sebagai kesimpulan:

- Pers nasional melaporkan peristiwa tersebut pada 5 Juni 2003, berdasarkan penjelasan pers dari pihak Koops maupun Penguasa Darurat Militer; yang berdasarkan penjelasan menyatakan bahwa suami-isteri tersebut tidak memberikan jawaban ketika ditanya sandi, juga tidak memberikan jawaban mengenai identitas mereka ketika tembakan peringatan diberikan.
- Pers nasional yang kemudian mengadakan penyelidikan di lokasi tidak menemukan bukti atau fakta yang berlainan dengan apa yang diberikan secara resmi.
- Pemerintah Pusat memberikan jawaban yang sama dengan apa yang dijelaskan di Banda Aceh, dan melakukan langkah diplomatis cepat dengan mengadakan hubungan dengan perwakilan pemerintah Jerman di Jakarta.
- Para pengamat, politisi (DPR) maupun Panglima Koops satu kata bahwa para prajurit telah menjalankan prosedur yang benar, dan itu adalah murni kecelakaan.
- Hanya satu kantor berita asing memberikan berita yang berbeda: pihak Koops telah menarik para prajurit yang terlibat dalam kasus itu, tetapi mereka tidak diberi sanksi apa pun.

Berita mengenai penembakan dua warga asing di masa lalu pasti akan menimbulkan kecaman atau tekanan internasional yang hebat, tetapi karena semua pihak yang terlibat dalam peristiwa itu bersikap transparan; maka sebab-sebab peristiwa sejak awal telah diketahui dan tidak ada usaha rekayasa atau menyembunyikan peristiwa itu.

3. Berita sebagian wilayah Aceh Timur mengalami pemadaman lampu akibat empat tiang listrik tekanan tinggi telah digergaji dan roboh hingga penyaluran listrik di bagian besar Aceh bagian Timur terganggu (6-7 Juni 2003). Listrik wilayah itu disalurkan melalui tiang listrik tekanan tinggi yang berasal dari PLTA Sigura-gura, Sumatra Utara.

- Listrik mati di wilayah Aceh Timur disebabkan oleh rubuhnya empat tiang listrik tegangan tinggi. Ini dilaporkan oleh semua media massa, beberapa diantaranya menyebutkan bahwa hal itu dilakukan oleh GAM; sebagian media tidak melaporkan siapa yang melakukan.
- Sejumlah wartawan yang melakukan investigasi dilokasi rubuhnya tiang-tiang itu menemukan fakta bahwa keempat kaki tiang digergaji bersamaan “dan hanya bisa dilakukan oleh mempunyai kemampuan mengorganisir secara teratur”. Wartawan tidak bisa menemukan saksi atau fakta mengenai siapa yang melakukan hal itu.
- Media mengutip keterangan pihak PLN mengenai kerugian yang didapat dan berapa lama diperlukan untuk mendirikan lagi tiang-tiang/menara tersebut; dan ada yang mengutip keterangan aparat TNI bahwa pihaknya tidak mungkin melakukan penjagaan di setiap menara yang ada “karena itu masyarakat harus turut menjaganya”.

Bukan Hal Baru

Sebetulnya program *embedded* bagi wartawan di Indonesia bukan yang pertama kalinya dilakukan mereka dan dahulu karena situasi serta kondisi yang amat berbeda dengan sekarang, tidak sempat menjadi kontroversi serius seperti sekarang ini.

Dalam operasi militer untuk menumpas pemberontakan yang dilakukan oleh APRI antara tahun 1950-1960, sejumlah wartawan diikutsertakan dengan pasukan yang beroperasi di berbagai tempat di Tanah Air, dan mereka lah yang memberitakan hasil-hasil operasi setelah mencapai titik tertentu. Bahkan Kolonel (waktu itu) Achmad Yani, Panglima Operasi “17 Agustus”, yaitu operasi penumpasan PRRI di Sumatra yang dimulai dengan operasi amfibi. Yani (Yani) malah dengan pengalaman belajarnya yang luas di luar negeri dan bahasa Inggris yang fasih melayani pertanyaan dari pers asing di atas kapal komando.

Pada rencana operasi (RO) Djajawidjaja, yaitu rencana perebutan Irian Barat dengan operasi militer di bawah pimpinan Mayjen Soeharto, sejumlah wartawan dari media-media di Jakarta diikutkan (*embedded*) di pangkalan aju armada penyerbu APRI di Kepulauan Banggai. Mereka bisa bertemu dan melakukan wawancara dengan siapa saja, tetapi tidak boleh menceritakan di daerah mana pangkalan tersebut berada dan jenis-jenis persenjataan apa yang dipersiapkan.

Dalam operasi rahasia (*covert operation*) di Timor Timur tahun 1975 sejumlah wartawan koran nasional dan TVRI dengan bebas mengikuti kegiatan-kegiatan “pasukan blue jeans” adalah adalah anggota Kopassandha (sekarang Kopassus) yang bermarkas di perbatasan Nusa Tenggara Timur dan Timtim yang melakukan operasi di Timtim tanpa identitas TNI mereka. Sejumlah wartawan lain, termasuk wartawan perang TVRI Hendro Subroto mengikuti operasi amfibi pada 7 Desember 1975 dan selama berbulan-bulan kemudian ikut dalam operasi di wilayah-wilayah konflik. Hanya karena ketatnya

pengendalian informasi publik pada waktu itu, pengalaman Hendro Subroto baru bisa dituangkan dalam buku 20 tahun setelah operasi tersebut.

Program penyertaan wartawan yang paling berhasil adalah pada periode kepemimpinan Jenderal TNI M. Jusuf. Ia memerintahkan agar sejumlah reporter muda dan madya untuk mengikuti pelatihan kemiliteran di Pusat Latihan Tempur di dekat Rangkasbitung, Banten selama 14 hari. Kemudian sebagian dari mereka mengikuti kegiatan dinas Menhankam/Pangab dan dibolehkan mendengar semua briefing tertutup dan Rapat Pimpinan yang biasanya jarang boleh diliput dan dalam banyak hal, dipersilakan untuk menulis apa yang dianggapnya mempunyai nilai berita. Dalam waktu 3 tahun saja, nama TNI/ABRI yang sempat terpuruk akibat tindakan keras mereka terhadap para mahasiswa pada peristiwa sekitar Januari 1978 di Jakarta dan Bandung, langsung melesat ke atas. Istilah Kemangunggalan ABRI – Rakyat tidak dianggap semboyan kosong tetapi menjadi kenyataan. Dan tampilan Jusuf di TVRI (satu-satunya media elektronika yang ada waktu itu) yang amat manusiawi menjadi tontonan yang memikat, jauh lebih memikat dibanding pidato-pidato Presiden Soeharto.

Pengertian Salah

Setelah reformasi, dimana kemerdekaan pers membuat informasi apapun bisa dimuat, banyak editor media massa, baik media cetak maupun media elektronika mempunyai pengertian yang sedikit menyimpang mengenai istilah *balance reporting* atau disebut secara lain sebagai *cover both side*.

Di televisi ini terlihat di masa konflik Aceh lalu, pernyataan pihak pemerinatah yang berdurasi 30 detik diikuti dengan pernyataan jurubicara GAM yang juga durasinya 30 detik. Ketika ditanyakan, alasannya adalah supaya “seimbang”. Jadi ukuran seimbang atau *balanced* adalah pihak A dan B dimuat dalam durasi waktu yang sama, secara *side-by-side*. Demikian pula di media cetak, terkadang kondisinya lebih parah lagi, kecenderungannya tanpa disadari menjadi “medan aduan” antara keterangan pihak A yang dibantah oleh pihak B. Dan keesokan harinya berlangsung mengenai topik yang lain tetapi substansiya tetap: bantah-membantah yang terkadang tidak bisa dihindari oleh nara sumber yang berhormat sekali pun.

Padahal inti dari apa yang disebut sebagai *balance reporting* adalah untuk mencari kebenaran. Jadi bila seseorang memberikan keterangan A, maka harus dicari apakah A itu benar-benar mempunyai nilai A; caranya bisa menanyai saksi mata, pakar atau melakukan penyelidikan sendiri untuk membuktikan apakah itu benar atau tidak. Jadi sama sekali bukan berarti dua pihak yang bertentangan pendapat dimuat secara mentah. Demikian pula *both side* yang dimaksud adalah dua sisi dari sebuah fakta peristiwa yang akan menunjuk pada fakta yang sepenuhnya mengandung kebenaran.

Sejumlah editor yang terlalu bersemangat sering meminta reporter di lapangan untuk melakukan laporan yang “seimbang” (dalam pengertian yang salah), padahal laporan yang dikirim ke editornya adalah laporan pandangan mata atau observasi yang dalam kaidah jurnalistik memungkinkan di muat tanpa *counter check* pada pihak lain di satu laporan yang sama. Segi lain yang mungkin terlewatkan atau belum sempat dilakukan bisa dimuat pada kesempatan berikutnya yang paling dekat.

Di Amerika Serikat, ketakutan bahwa pers yang *embeded* dengan pasukan dari Divisi Infanteri ke-3 AD-AS serta Divisi Marinir ke-1 akan memberikan laporan yang tidak *balanced* lenyap setelah seminggu. Laporan mereka dari medan pertempuran bersifat apa

adanya, dan mereka tidak pernah menyebut lawan (pihak Irak) dengan kata-kata “kaum terror” atau “pihak musuh”. Pers kita bisa mengambil contoh dari mereka yang dianggap baik, umpamanya tidak perlu memakai kata-kata yang sering dipakai pihak TNI bahwa kelompok GAM adalah GPK (Gerombolan Pengacau Keamanan) atau “kelompok seperatis bersenjata”. Karena kata ganti GAM untuk sekelompok orang yang hendak memisahkan diri dari NKRI dengan alasan serta sebab yang bermacam, sudah jelas bagi pembaca koran atau penonton televisi.

Pers juga harus banyak mengandalkan pada dokumentasi, karena akibat arus informasi yang begitu cepat, masyarakat sering lupa pada suatu peristiwa masa lalu, dan tidak menganggap aneh suatu pernyataan dari suatu tokoh di masa sekarang yang sebetulnya bertentangan dengan pernyataannya di masa lampau. Untuk “mendidik” para politisi atau pengamat, maka *record* ucapannya yang lalu harus dimuat juga, bila sudah berbeda atau malah bertentangan, sehingga proses *check and recheck* membeir kejelasan kepada masyarakat.

Memang baru sekarang ini masalah peliputan operasi pemulihan keamanan di suatu daerah konflik di Tanah Air menjadi *concern* banyak pihak. Dalam beberapa konflik horizontal yang terjadi sebelumnya, semua pihak masih dalam proses saling belajar yang akibatnya tidak menguntungkan bagi semua pihak. Pers (dalam banyak kasus terdahulu) cenderung hanya memuat apa yang nampak dipermukaan (dalam kasus Ambon malah lebih parah lagi), pemerintah selalu curiga kepada pers, dan kelompok-kelompok masyarakat yang bertikai selain tidak puas dengan cara pemberitaan, tetapi menjadikan suatu pemberitaan sebagai *pretext* untuk melakukan tindak kekerasan yang baru.

Usaha untuk mencari jalan keluar dari kesemerawutan itu, dengan antara lain memperkenalkan teori-teori *peace journalism* belum langsung nampak hasilnya.

Kondisi yang ada di lapangan:

1. Semakin sedikit wartawan yang melakukan liputan masalah konflik bersenjata tidak mempunyai pengertian yang jelas mengenai latar belakang yang mendalam mengenai konflik itu. Ia ke Aceh karena ditugaskan untuk redaktornya atau ingin mendapat kredit melakukan liputan di medan yang sulit.
2. Di masa lampau, banyak wartawan yang meliput ke Aceh yang karena alasan-alasan soal keamanan, sulitnya memperoleh transportasi ke wilayah tertentu atau tidak mampu menguasai medan; lalu melakukan liputan dengan hanya mengutip ucapan pejabat resmi saja atau dari siaran berita resmi (*press release*), akibatnya didapatkan informasi yang berasal dari satu arah. Jadi wartawan yang hanya tinggal di Banda Aceh dan hanya menjadi corong satu sumber informasi.
3. Tidak banyak wartawan yang tahu mengenai bagaimana melakukan liputan langsung di daerah konflik, melihat sendiri suatu kontak senjata tetapi tetap aman dan selamat karena mengerti betul bagaimana mengambil gambar (ini terutama menyangkut wartawan televisi dan juru foto) dari lokasi “panas”.
4. Di lapangan, masih banyak wartawan garis depan (*front liner*) seperti jurukamera yang tidak memakai pelindung diri seperti helm atau rompi, entah karena alasan membuat tubuh kurang leluasa bergerak atau karena tidak mampu menyediakannya karena harganya mahal. Kompromi yang diambil, umpamanya hanya mengikuti atau meliput setelah suasana aman, membuat laporannya kurang “hidup”.

5. Pengertian mengenai istilah militer-teknis sedikit dikuasai oleh sejumlah besar wartawan sehingga sering laporannya menjadi kurang *in-deph*..
6. *Human interest story* dari daerah konflik Aceh yang sebetulnya bisa menggerakkan opini pembaca/penonton televisi jarang dilakukan di masa lampau.
7. Secara teknis, laporan bertutur atau teknik reportase mendalam kurang dikuasai oleh sejumlah reporter muda. Masih terlalu banyak *strait news*.

Sebaliknya pihak-pihak yang terlibat konflik di masa lalu tidak mau atau kurang menyadari betapa pentingnya peran dari pers.

1. Wartawan dianggap sebagai pihak yang tidak perlu diberitahu mengenai latarbelakang mengenai peristiwa itu sendiri, dan merasa cukup puas bila telah memberikan siaran pers tertulis (bahkan tanpa ada konferensi pers yang memungkinkan adanya dialog interaktif).
2. Wartawan terlalu cepat dianggap sebagai “pihak sana” begitu menyiarkan sebuah laporan bersumber dari pihak yang dianggap musuh. Di Aceh masa lampau, aparat TNI sering marah karena wartawan atau reporter mewawancarai bertemu dengan tokoh GAM (sampai-sampai pernah Jenderal TNI Wiranto pernah mengeluh, “Intel kita bagaimana sih, wartawan kok gampang menemui Panglima GAM dibanding kita?”). Sebaliknya pihak GAM sering mengancam wartawan agar mewawancarai tokohnya. Jadi wartawan Indonesia di masa lalu sering menjadi pihak yang tidak disenangani oleh dua pihak sebaliknya diperlukan juga oleh kedua pihak.
3. Pengertian “jurnalisme patriotik” yang justru didengung-dengungkan (dan didorong) oleh pemerintah masih belum jelas tujuannya dan terkadang diartikan secara terlalu sempit, padahal banyak hal lain yang patut dipertimbangkan.
4. Pihak TNI mempunyai pengalaman pahit berhadapan dengan “pers partisan” dan “wartawan juru kipas” dalam konflik horisontal di Ambon sehingga banyak diantara mereka yang enggan memberi informasi penting kepada pers. Di Maluku Utara, Penguasa Darurat Sipil malah mengeluarkan larangan liputan bagi sejumlah media, karena pemberitaan korektif oleh media malah dianggap “mengurangi” kewibawaannya.
5. Pihak pemerintah/TNI tidak mempunyai atau hanya sedikit mempunyai jurubicara yang mampu memberikan keterangan yang jelas, punya informasi latarbelakang yang mendalam dan mampu dihubungi setiap waktu. Dalam beberapa kasus terdahulu di Aceh, jurubicara hanya memberikan keterangan pada waktu-waktu dimana perlu diberitakan sebuah informasi yang menguntungkan pihaknya.
6. Jurubicara di tingkat Penguasa Darurat seharusnya mempunyai akses langsung kepada Panglima Komando Operasi (Pangkoops) atau Penguasa Darurat Militer sehingga bobot informasi yang diberikan itu sama dengan apa yang diucapkan oleh Panglima seperti juga di Jakarta, Kepala Puspen TNI bisa langsung berhubungan dengan Panglima TNI.
